

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 19 dari 44

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

Metodologi pengukuran capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2011 memperhatikan beberapa kriteria yaitu :

- a. Jumlah Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
- b. Jumlah laporan tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal
- c. Jumlah Temuan yang berindikasi kerugian negara
- d. Jumlah Unit Kerja yang diaudit sesuai PKPT
- e. Jumlah Laporan Hasil Audit yang diterbitkan sesuai PKPT maupun diluar PKPT

Berdasarkan data tersebut diatas, Inpektorat menganalisa dan kemudian diperoleh hasil pencapaian kinerja pada tahun 2011 sehingga dapat disajikan berupa jumlah unit kerja, laporan dan prosentase capaian.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011.

3.2.1 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan Inspektorat pada tahun 2011 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Penetapan Kinerja Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	2 SatKer
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	85%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	15%

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 20 dari 44

3.2.2 Pengukuran Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2011 adalah sebagai berikut

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2011

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	2 (dua) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	10 (sepuluh) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	100%	Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK berdasarkan SK Kepala BATAN
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	85 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100%	Dari 78 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti seluruhnya.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 15 %	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 8,97%	100%	Dari 78 temuan pemeriksaan, hanya terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran IKU

3.3.1 Indikator Sasaran 1

Jumlah Dokumen Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpenggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* khususnya di lingkup BATAN salah satunya dengan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu unit kerja. Kriteria WBK pada suatu unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas pokok, disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 44

menentukan pendeklarasian status suatu unit kerja di lingkup BATAN sebagai wilayah bebas dari korupsi. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal. Pada institusi Inspektorat sendiri melekat suatu tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup BATAN, yang turut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir di Indonesia. Penetapan status suatu unit kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai wilayah bebas dari korupsi.

Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2011 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2011 sebanyak 2 Unit Kerja sedangkan Realisasi yang dicapai sebanyak 10 Unit Kerja. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat serta Tim Penggerak WBK melalui beberapa proses kegiatan dari penyusunan pedoman, penilaian, sosialisasi hingga pada akhirnya dapat ditetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Prosentase tersebut didapatkan dari jumlah proses kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tersusunnya Pedoman Penetapan WBK
2. Terbentuknya Tim Penggerak WBK
3. Telah dilaksanakan Seleksi Unit Kerja Calon WBK
4. Telah dilaksanakan Sosialisasi WBK kepada seluruh Unit Kerja di BATAN
5. Telah ditetapkan 10 Unit Kerja Uji Coba WBK Tahun 2011 sesuai Keputusan Sekretaris Utama No: 255/SU/IX/2011 tanggal 28 September 2011
6. Telah dilaksanakan Uji Coba Unit Kerja berpredikat WBK selama 3 Bulan

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 22 dari 44

7. Secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi
8. Penetapan dan deklarasi WBK
9. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan WBK

Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi adalah :

1. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB)
2. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)
3. Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN)
4. Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG)
5. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN)
6. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)
7. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR)
8. Pusat Diseminasi Iptek Nuklir (PDIN)
9. Inspektorat
10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT)

Berdasarkan data tersebut, prosentase capaian kegiatan WBK disimpulkan sebesar 100%.

Kesimpulan :

Target tahun 2011 : 2 (dua) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK.

Realisasi tahun 2011 : 10 (sepuluh) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK.

3.3.2 Indikator Sasaran 2

Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Kegiatan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan tindak lanjut serta penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK adalah sama - sama melakukan kegiatan untuk memberikan jawaban atau penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan yang membedakan adalah pelaksanaan tindak

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
		Revisi	: 0
	LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011	Halaman	: 23 dari 44

lanjut, baik dalam form pengisian maupun dalam laporan hasil pemeriksaan (eksternal dan internal)

Tahapan evaluasi tindak lanjut , rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK dalam laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2011 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK.

Dari 78 temuan eksternal maupun internal yang terdapat pada tahun 2011 telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dengan demikian capaian prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan internal dan eksternal sebesar 100%. Capaian tersebut telah melampaui target yang direncanakan sebesar 85%.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 24 dari 44

Kesimpulan :

Secara umum tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dapat tercapai 100%, dituangkan dalam 1 bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Target tahun 2011 :85 % penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Realisasi tahun 2010 :100% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

3.3.3 Indikator Sasaran 3

Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

Sampai saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum teratasi secara tuntas. Hal ini sering menjadi sorotan berbagai lembaga internasional bahwa praktek KKN di Indonesia masih berada pada peringkat atas. Masalah ini bahkan telah memasuki ruang lingkup instansi pemerintah, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan mengingat tugas pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan mengganggu moral sekaligus kinerja aparat pemerintahan serta menjadi tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Jenis temuan pemeriksaan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terbagi menjadi beberapa jenis , yaitu :

1. Kasus yang merugikan negara
2. Kewajiban menyeter kepada negara
3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan
4. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
5. Penyimpangan dari ketentuan anggaran
6. Hambatan terhadap kelancaran proyek
7. Hambatan terhadap tugas pokok
8. Kelemahan administrasi

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 25 dari 44

9. Ketidاكلancaran pelayanan kepada masyarakat

10. Temuan pemeriksaan lainnya

Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 15%, realisasi tahun 2011 sebesar 8,97%. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 7 temuan dari total 78 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Target inspektorat maksimal hanya 15% dan realisasinya hanya 8,97% jadi masih lebih baik daripada target 15%.

Kesimpulan:

Target sasaran Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 15 % dapat tercapai 100%

Target tahun 2011 : 0 – 15 % persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar

Realisasi tahun 2011 : 100% (8,97 % jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara)

3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran Non IKU

3.4.1 Indikator Sasaran 1

Jumlah Dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor: 392/KA/XI/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Inspektorat melaksanakan audit dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mencakup penilaian kecukupan pengendalian manajemen, kecukupan prosedur, keekonomisan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber dana dan daya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala kebijakan dan prosedurnya. Secara rinci tujuan audit Inspektorat adalah sebagai berikut :

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi	: 0
		Halaman	: 26 dari 44

- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- b. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan mengukur efektivitas pelaksanaan program;
- c. Menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektifitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. Menilai kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi beserta aspek penunjangnya yaitu aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek metode kerja. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dengan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.

Pada tahun 2011, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan yaitu sebanyak 21 unit kerja dengan penerbitan LHA sebanyak 14 dokumen LHA (3 LHA PKPT tahun 2010 dan 11 LHA PKPT tahun 2011) sisanya sedang dalam proses penyusunan. Selain itu terdapat pemeriksaan khusus sebanyak 4 unit kerja dengan jumlah laporan sebanyak 2 laporan dan sisanya masih dalam proses sehingga total laporan audit kinerja sebanyak 16 laporan.

Kesimpulan :

Secara umum pelaksanaan audit kinerja terlaksana 21 unit kerja dengan capaian 100% , dituangkan dalam bentuk 14 laporan hasil audit kinerja dan 2 laporan audit khusus. Sisa 7 laporan sedang dalam proses penyusunan LHA.

Target tahun 2011 : 21 Laporan Hasil Audit

Realisasi tahun 2011 : 16 Laporan Hasil Audit

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi	: 0
		Halaman	: 27 dari 44

3.4.2 Indikator Sasaran 2

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja dan dokumen reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN.

- Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat difokuskan pada evaluasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP merupakan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja di BATAN. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi.

Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

- Tahapan reviu laporan keuangan meliputi perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu. Tahap perencanaan reviu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk meyeleksi dan menentukan objek reviu, proses penyelenggaraan akuntansi dan akun LK K/L yang akan direviu, dan pemilihan langkah – langkah reviu. Tahap pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi	: 0
		Halaman	: 28 dari 44

penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reuiu, serta penyusunan Kertas Kerja Reuiu. Tahap pelaporan reuiu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reuiu, Ikhtisar hasil Reuiu, dan laporan hasil Reuiu, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA dengan tingkat UAPA.

Pada tahun 2011, Inspektorat telah melaksanakan 2 kali reuiu yaitu reuiu laporan keuangan tahun 2011 dan reuiu laporan keuangan semester 1 tahun 2011.

Kesimpulan :

Secara umum evaluasi kinerja dan reuiu laporan keuangan dapat tercapai 100%, dituangkan dalam bentuk 4 laporan hasil evaluasi dan 2 laporan hasil reuiu.

Target tahun 2011 : 6 Laporan

Realisasi tahun 2011 : 6 Laporan

3.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan

Hingga akhir tahun 2011, Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun capaian kegiatan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Sasaran utama

Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN

Dalam mendukung sasaran utama tersebut, Inspektorat ditunjang beberapa kegiatan sebagai berikut:

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi	: 0
		Halaman	: 29 dari 44

3.5.1 Evaluasi Laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK.

Kegiatan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan tindak lanjut serta penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK adalah sama - sama melakukan kegiatan untuk memberikan jawaban atau penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan , dan yang membedakan adalah pelaksanaan tindak lanjut, baik dalam form pengisian maupun dalam laporan hasil pemeriksaan (eksternal dan internal)

Tahapan evaluasi tindak lanjut , rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK dalam laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2011 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK

Rincian mengenai laporan tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK adalah sebagai berikut:

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 30 dari 44

- 1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai PKPT sebanyak 11 (sebelas) laporan :
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri
 - Pemeriksaan operasional Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
 - Pemeriksaan operasional Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
 - Pemeriksaan operasional Pusat Diseminasi Iptek Nuklir
- 2) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan khusus sebanyak 2 (dua) laporan :
 - Pemeriksaan Khusus Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.
 - Pemeriksaan Khusus Pusat Perangkat Nuklir dan Rekayasa.
- 3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lalu (tahun 2010) sebanyak 3 (tiga) laporan :
 - Pemeriksaan operasional Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.
 - Pemeriksaan operasional Kantor Pusat BATAN.
 - Pemeriksaan operasional Inspektorat.

Berdasarkan data tersebut, jumlah laporan yang telah dicapai sebanyak 16 laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

3.5.2 Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan

Kegiatan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang dititik beratkan pada evaluasi implementasi pelaksanaan SIMWAS dilaksanakan oleh Tim Inspektorat, serta kegiatan ini berlangsung selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2011 melalui beberapa sub kegiatan berikut:

- Maintenance software dan hardware program database sistem informasi pengawasan.
- Pembuatan modul pelaksanaan audit Offline.
- Pembuatan modul audit eksternal BPK dan BPKP

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen	: /OT.01.04/2012
		Tanggal	: Pebruari 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Revisi	: 0
		Halaman	: 31 dari 44

- Pembuatan modul pengaduan masyarakat.
- Maintenance Modul & data referensi
- Maintenance Modul & data parameter Aplikasi

Pada awal pelaksanaan kegiatan penyempurnaan sistem informasi manajemen pengawasan dimulai dengan memperbaharui data referensi pengawasan serta program kerja pengawasan tahunan yang dilaksanakan pada triwulan pertama, data tersebut dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan selama satu tahun berjalan. Program kerja tersebut mencakup pelaksanaan pemeriksaan operasional rutin serta evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada triwulan 2,3 dan 4 kegiatan telah memasuki tahapan memperbaharui PKA, KKA, rincian temuan serta laporan hasil audit yang waktunya disesuaikan dengan Program kerja yang telah disusun pada triwulan pertama. Data tersebut diperbaharui serta di input ke dalam database sistem informasi manajemen pengawasan oleh masing – masing auditor sebagai dokumen pribadi yang datanya tersimpan dalam database sistem, namun tetap dapat diakses oleh auditor lain secara berjenjang untuk dapat dievaluasi dan diberikan rekomendasi.

Kesimpulan :

Laporan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan telah disusun sebanyak 1 Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara umum kegiatan tersebut telah terlaksana 100% baik dari segi dana maupun dari segi kegiatan.

Realisasi tahun 2011 : 1 Laporan penyempurnaan simwas.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 32 dari 44

3.5.3 Pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2004 serta pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi.

Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan data/ informasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 serta pembentukan program Wilayah Bebas Korupsi di BATAN.
- Menetapkan Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi di BATAN.
- Melakukan sosialisasi / workshop pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 serta pembentukan program Wilayah Bebas Korupsi di BATAN.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 serta pembentukan program Wilayah Bebas Korupsi di BATAN secara periodik.

Kesimpulan :

Laporan Pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2004 telah disusun sebanyak 1 Laporan setiap semester sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara umum kegiatan tersebut telah terlaksana 100% baik dari segi dana maupun dari segi kegiatan, sedangkan pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi tercapai 10 Unit Kerja berpredikat WBK dari target hanya 2 Unit Kerja
Realisasi tahun 2011 : 2 Laporan hasil Monitoring dan evaluasi dan 10 satker yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi

3.5.4 Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat pada tahun 2011 mencakup audit operasional, pemeriksaan kinerja (Lakip), reuiu laporan keuangan serta terdapat beberapa pemeriksaan khusus (Riksus) dengan rincian sebagai berikut :

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 33 dari 44

1. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Realisasi pemeriksaan sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2011 terdiri dari :

a. Sesuai PKPT sebanyak 21 (dua puluh satu) obyek pemeriksaan.

OBYEK PEMERIKSAAN		RENCANA	REALISASI
1	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir	Pebruari	7 Pebruari 2011
2	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir	Pebruari	7 Pebruari 2011
3	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif	Maret	7 Maret 2011
4	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir	Maret	7 Maret 2011
5	Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir	April	19 April 2011
6	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	April	19 April 2011
7	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	Mei	19 Mei 2011
8	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Mei	18 Mei 2011
9	Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir	Juni	25 Juli 2011
10	Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka	Juni	26 Juli 2011
11	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir	Juli	2 Agustus 2011
12	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	Juli	2 Agustus 2011
13	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	September	26 Sept 2011
14	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	September	26 Sept 2011
15.	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	September	3 Okt 2011
16.	Pusat Pengembangan Energi Nuklir	Agustus	21 Nop 2011
17.	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir	Agustus	30 Nop 2011
18.	Pusat Pengembangan Geologi Nuklir	Oktober	22 Nop 2011
19.	Pusat Reaktor Serba Guna	Oktober	30 Nop 2011
20.	Kantor Pusat BATAN	Nopember	30 Des 2011
21.	Inspektorat	Nopember	30 Des 2011

b. Di luar PKPT sebanyak 6 (enam) obyek pemeriksaan.

- Pemeriksaan Khusus PKTN, tanggal 20 Januari 2011

- Reviu Laporan Keuangan BATAN, tanggal 17 Pebruari 2011.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 34 dari 44

- Evaluasi LAKIP 24 Unit Kerja BATAN, bulan April s.d. September 2011
- Pemeriksaan Khusus PATIR, tanggal 4 Juli 2011.
- Pemeriksaan Khusus PRPN, tanggal 26 Juli 2011.
- Pemeriksaan Khusus BSDM, tanggal 19 Desember 2011

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2011 terdiri dari :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai PKPT sebanyak 11 (sebelas) laporan

OBYEK PEMERIKSAAN		NOMOR & TGL. LHP
1	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.	001/ISP.B/V/2011, 03 Mei 2011
2	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.	002/ISP.D/V/2011, 09 Mei 2011
3	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.	003/ISP.A/V/2011, 26 Mei 2011
4	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.	004/ISP.C/VI/2011, 30 Juni 2011
5	Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir	005/ISP.A/VI/2011, 30 Juni 2011
6	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	006/ISP.B/VI/2011, 24 Juni 2011
7	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	007/ISP.D/VII/2011, 08 Juli 2011
8	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	008/ISP.D/X/2011, 25 Oktober 2011
9	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	009/ISP.C/X/2011, 26 Oktober 2011
10	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	010/ISP.A/XII/2011, 13 Desember 2011
11	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	011/ISP.D/XII/2011, 16 Desember 2011

b. Laporan Hasil Pemeriksaan di luar PKPT sebanyak 4 (empat) laporan.

- Reviu Laporan Keuangan BATAN No. R-130/WP.00/ISP.2/2011, tanggal 28 Pebruari 2011.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 35 dari 44

- Pemeriksaan Khusus PKTN No. R-174/WP.00.01/ISP.2/2011, tanggal 11 April 2011.
 - Evaluasi LAKIP PSJMN No. 005/ISP.A/VI/2011, tanggal 08 Agustus 2011
 - Pemeriksaan Khusus PRPN No. R-329/WP.00.01/ISP.2/2011, tanggal 16 September 2011
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT Tahun lalu (tahun 2010) sebanyak 3 (tiga) laporan.

OBYEK PEMERIKSAAN		NOMOR & TGL. LHP
1	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir	023/ISP.A/II/2011, 14 Pebruari 2011
2	Kantor Pusat BATAN	024/ISP.C/II/2011, 18 Pebruari 2010
3	Inspektorat	025/ISP.A/III/2011, 31 Maret 2011

Jumlah Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.

- a. Hasil Temuan dari Inspektorat BATAN sampai dengan Tahun 2011. Dari 14 (empat belas) Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai PKPT dan PKPT tahun lalu yang diterbitkan diperoleh temuan pemeriksaan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) buah dan temuan pemeriksaan khusus sebanyak 6 (enam) buah tidak termasuk dalam tabel karena merupakan audit di luar PKPT.

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0
02	Kewajiban menyettor kepada negara.	3	3	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11	11	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	4	4	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	10	10	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	0	0	0

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 36 dari 44

08	Kelemahan administrasi.	26	26	0
09	Ketidak lancarn pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	3	3	0
JUMLAH		57	57	0

Keterangan :

- TPL = Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.
- TPB = Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.

b. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Luar.

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	BPK			BPKP		
		TEMUAN	TPL	TPB	TEMUAN	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0	0	0	0
02	Kewajiban menyetor kepada negara.	4	4	0	0	0	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	1	0	0	0	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	0	0	0	0	0	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	4	4	0	0	0	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	0	0	0	0	0	0
08	Kelemahan administrasi.	6	6	0	0	0	0
09	Ketidak lancarn pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		15	15	0	0	0	0

Keterangan :

- TPL = Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.
- TPB = Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 37 dari 44

3.6 Perbandingan realisasi kinerja.

Perbandingan capaian sasaran Inspektorat pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Realisasi tahun 2010 dengan Realisasi tahun 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	0 SatKer	10 Satker
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	100%	100%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	100%	100%

Rincian Capaian sasaran pada tahun 2010 dan 2011 dijabarkan pada tabel berikut :

Capaian Sasaran pada Tahun 2010.

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	1 (satu) Dokumen Satuan Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	1 draft pedoman Wilayah Bebas dari Korupsi Satker yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi	80% 0%
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	80 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	95 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal atas LAKIP, Lap. Keuangan dan Kinerja Satker	100%
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 20 %	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 6,5%	100%

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		Halaman : 38 dari 44

	4	Jumlah dokumen audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	21 (dua puluh satu) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	24 (dua puluh empat) Dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	114%
	5	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN	4 (empat) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	3 (tiga) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	75% LHE 100% LHR

Pencapaian sasaran pada tahun 2011

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	2 (dua) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	10 (sepuluh) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	100%	Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK berdasarkan SK Kepala BATAN
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	85 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100%	Dari 78 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti seluruhnya.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 0 - 15 %	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 8,97%	100%	Dari 78 temuan hasil pemeriksaan, hanya terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
		Halaman : 39 dari 44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		

Capaian indikator kinerja s/d tahun berjalan dengan target 5 tahun.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target s/d 2011	Realisasi s/d 2011	Target s/d 2014	Prosentase (%)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	3 Unit Kerja	10 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	85%	100%	100%	100%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	15%	8,97%	0%	100%

3.7 Akuntabilitas Keuangan

ANGGARAN (DIPA) INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KODE	KEGIATAN	DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	PROSEN TASE
1	2	3	4	5	6
	52	BELANJA BARANG			
	5212	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL			
1.	521211	Belanja Bahan	102.218.000,-	101.706.100,-	27,17
2.	521213	Honor Terkait Output Kegiatan	86.000.000,-	82.700.000,-	55,35
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	203.070.000,	184.406.100,-	39,10
	5221	BELANJA JASA			
3.	522115	Belanja Jasa Profesi	13.600.000,-	13.275.000,-	97,61
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	13.600.000,-	13.275.000,-	97,61
	5241	BELANJA PERJALANAN DALAM NEGERI			

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
		Halaman : 40 dari 44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		

4.	524111	Belanja Perjalanan Dinas	286.070.000,-	261.577.800,-	63,78
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	286.070.000,-	261.577.800,-	63,78
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	464.888.000,-	459.258.900,-	98.79
	5321	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
5.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,-	0,00
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	0,-	0,00
	5361	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA			
6.	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0,-	0,00
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	0,-	0,00
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	0,-	0,00
		JUMLAH BELANJA OUTPUT 3431.01	464.888.000,-	459.258.900,-	98.79
		JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3431	464.888.000,-	459.258.900,-	98.79
	3431	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATUR.			
	02	LAPORAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATUR.			
	51	BELANJA PEGAWAI			
7.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	779.265.000,-	765.965.420,-	98,29
8.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000,-	18.280,-	83,33
9.	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	65.187.000,-	63.542.760,-	97,48
10.	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	16.631.000,-	17.478.820,-	105,10
11.	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	49.270.000,-	49.270.000,-	100,00
12.	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	211.506.000,-	92.285.000,-	44,03
13.	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	32.889.000,-	41.222.470,-	125,34



INSPEKTORAT
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2011

No. Dokumen	:	/OT.01.04/2012
Tanggal	:	Pebruari 2012
Revisi	:	0
Halaman	:	41 dari 44

14.	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.679.000,-	50.814.040,-	142,42
15.	511129	Belanja Uang Makan PNS	127.087.000,-	67.760.000,-	53,32
16.	511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	217.764.000,-	210.935.000,-	97,74
17.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.479.000,-	14.180.000,-	97,93
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1.549.779.000,-	1.373.471.790,-	88,80
	5122	Belanja Lembur			
18.	512211	Belanja Uang Lembur	13.240.000,-	13.100.000,-	98,94
		JUMLAH SUB KEL. 5122	13.240.000,-	13.100.000,-	98,94
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1.563.019.000,-	1.386.571.790,-	88,89
	52	BELANJA BARANG			
19.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	85.400.000,-	85.199.000,-	99,76
20.	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.200.000,-	43.197.000,-	99,99
21.	521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	100.140.000,-	100.140.000,-	100,00
22.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	56.250.000,-	51.250.000,-	91,11
		JUMLAH SUB KEL. BELANJA 5211	284.990.000,-	279.786.000,-	98,17
	5212	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL			
23.	521211	Belanja Bahan	192.484.000,-	192.135.100,-	99,82
		JUMLAH SUB KEL. BELANJA 5212	192.484.000,-	192.135.100,-	99,82
	5231	BELANJA PEMELIHARAAN			
24.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.570.000,-	61.895.739,-	98,92
		JUMLAH SUB KEL. BELANJA 5231	62.570.000,-	61.895.739,-	98,92
	5241	BELANJA PERJALANAN DALAM NEGERI			
25.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	718.345.000,-	715.107.000,-	99,55
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	718.345.000,-	715.107.000,-	99,55
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.258.389.000,-	1.248.923.839,-	99,25
	53	BELANJA MODAL			
	5321	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			

	INSPEKTORAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	No. Dokumen : /OT.01.04/2012
		Tanggal : Pebruari 2012
		Revisi : 0
		Halaman : 42 dari 44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011		

26.	532111	Belanja modal peralatan dan mesin	28.000.000,-	27.050.500,-	96,61
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	28.000.000,-	27.050.500,-	96,61
27.	521211	Belanja bahan	17.820.000,-	17.610.900,-	98,83
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17.820.000,-	17.610.900,-	98,83
28.	524111	Belanja perjalanan dinas biasa	25.180.000,-	24.900.000,-	98,89
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	25.180.000,-	24.900.000,-	98,89
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	43.000.000,-	42.510.900,-	98,86
29.	532111	Belanja modal peralatan dan mesin	80.000.000,-	79.400.000,-	99,25
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	80.000.000,-	79.400.000,-	99,25
30.	5361	Belanja modal fisik lainnya	47.000.000,-	46.970.000,-	99,94
		JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	47.000.000,-	46.970.000,-	99,94
JUMLAH			3.484.296.000,-	3.290.685.929,-	94,52

3.8 Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran tahun 2011.

Secara umum pencapaian sasaran inspektorat tahun 2011 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan, seluruh indikator kinerja mempunyai realisasi 100% bahkan terdapat 1 indikator yaitu pembentukan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang melebihi dari target yang ditetapkan dan merupakan suatu keberhasilan yang diharapkan dapat dipertahankan pada masa yang akan datang.